

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PADA BANK
SAMPAH INDUK BUNCU ELHA KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(S1) pada jurusan Administrasi Publik



OLEH

DECKY WAHYUDI

NPM 2022344

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : DECKY WAHYUDI

NPM : 2022344

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PADA
BANK SAMPAH INDUK BUNCU ELHA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Gumaidi, S.Sos, M.AP.
NUPTK. 4752766667131062

Eka Santi Agustina, S.Sos, M.M CIAQaR.
NUPTK. 160766667230433



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PADA BANK SAMPAH INDUK BUNCU ELHA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran serta informasi data yang saya dapatkan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada .

1. Terimakasih kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada penulis selama proses penulisan.
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S. Sos M.AP., CIQar., CIQnR. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos.,M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
4. Bapak Dr. Jumaidi, S.Sos, M.AP. selaku dosen pembimbing 1 yang telah membantu dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
5. Ibu Eka Santi Agustina, S.Sos, M.M CIAQaR. selaku dosen pembimbing II yang juga telah membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
6. Seluruh keluarga yang sudah memberi semangat dan doa nya dalam pembuatan proposal ini.

7. Serta teman teman seperjuangan di STIA Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga menyelesaikan proposal skripsi ini bersama sama.

Semoga penulisan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan. Terimakasih saya ucapkan.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Tipe Penelitian	30
D. Data dan Sumber Data	30
E. Desain Operasional penelitian	33

F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Uji Kredibilitas Data.....	37

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Data Informan.....	33
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta aktivitas ekonomi yang semakin berkembang telah menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahunnya. Apabila tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan ini menegaskan bahwa bank sampah merupakan salah satu strategi nasional dalam pengurangan dan penanganan sampah melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang berbasis partisipasi masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku, serta peningkatan nilai ekonomi sampah melalui kegiatan pemilahan dan pengolahan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengembangkan program bank sampah sebagai salah satu solusi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu implementasinya adalah melalui keberadaan Bank Sampah Induk BUNCU ELHA yang berperan sebagai pusat pengelolaan dan pembinaan bank sampah unit di tingkat masyarakat. Keberadaan bank sampah induk ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi program bank sampah di Bank Sampah Induk BUNCU ELHA masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu fenomena yang terlihat adalah: masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat secara optimal sebagaimana yang diharapkan dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021.

Selain itu: sebagian masyarakat masih enggan untuk menukarkan sampahnya ke bank sampah, yang dapat dilihat dari kondisi bank sampah yang relatif sepi pengunjung pada waktu-waktu tertentu. Rendahnya tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa fungsi bank sampah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal.

Permasalahan lainnya adalah: belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat bank sampah itu sendiri. Sampah yang terkumpul

umumnya tidak melalui proses daur ulang atau pengolahan lebih lanjut, melainkan hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan Permen LHK No. 14 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya pengolahan sampah untuk meningkatkan nilai tambah serta mengurangi timbulan sampah secara signifikan.

Berdasarkan fenomena masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PADA BANK SAMPAH INDUK BUNCU ELHA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahanpun menjadi terarah dan tidak menyimpang dan pokok permasalahan yang peneliti bahas . Maka peneliti memfokuskan penelitian ini menurut Warwick (dalam Kadjil Y, 2015: 70-71) yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Organisasi
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

C. Rumusan Masalah

Sebagai usaha untuk melakukan penelitian yang lebih terarah dan lebih mudah memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian mengenai apa saja yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis dalam konteks ilmu administrasi publik, yang berhubungan dengan Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengoptimalkan tugasnya dalam pelaksanaan Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Fitria Kurniawati (2018) Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi. Penelitian ini berjudul Implementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode analisis dan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bank Sampah Malang: Untuk implementasi program Bank Sampah Malang dalam upaya pemberdayaan masyarakat terdapat dua program yang dijalankan di BSM yaitu program tabungan sampah dan program pembelajaran pengolahan sampah. Program tabungan sampah dimaksudkan untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan dari sampah dan mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA. Sedangkan program pembelajaran pengolahan sampah diperuntukkan bagi pihak-pihak yang ingin belajar mengenai bagaimana mengolah sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). BSM sendiri sudah mulai menjalankan program ini sejak tahun 2011 dengan menggunakan dana bantuan dari CSR PLN dan hibah dari Pemkot Malang dan masih berjalan hingga kini serta telah mandiri dalam sektor ekonomi. Dan Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

program Bank Sampah Malang dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaannya terdapat banyak aktor yang terlibat, sumberdaya yang digunakan, dan struktur birokrasi yang mendukung. Komunikasi terjalin dengan erat antar aktor dan informasi disampaikan dengan jelas serta seluruh pihak telah mengerti tugas dan wewenangnya dengan baik. Aktor pelaksana sendiri juga memiliki kesediaan dalam melaksanakan program yang dimiliki Bank Sampah tanpa adanya paksaan.

2. Norhikmah (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amauntai (STIA). Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang diambil melalui *purposive sampling* berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan Teknik Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka uji kreabilitas data, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa tingkat kebersihan pelaksanaan kebijakan masih kurang baik. Pertama, komunikasi pada indikator transmisi masih belum baik, pada indikator kejelasan informasi masih belum baik dilihat dari kurangnya sosialisasi. Kedua, sumber daya pada

indikator staf belum baik dan juga kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan pada indikator fasilitas masih belum baik seperti kurangnya tempat sampah bagi setiap desa, dll. Ketiga, disposisi pada indikator sikap pelaksana kebijakan sudah baik dan pada indikator kedisiplinan pegawai sudah baik. Keempat, struktur birokrasi pada indikator fragmentasi sudah baik dan pada indikator standar operasional prosedur sudah baik karena sudah ada pembagian tugas yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, fasilitas yang kurang lengkap dan staf yang kurang. faktor pendorong yaitu sikap pelaksanaan kebijakan dan adanya kerjasama antar pegawai. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan kejelasan informasi kebijakan secara menyeluruh, menambah fasilitas sarana prasarana. Kepada kepala dinas lingkungan hidup memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan dengan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kepada para pegawai diharapkan agar selalu menjalankan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana program yang telah direncanakan. Kepada masyarakat agar lebih aktif lagi berpartisipasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

Kesenjangan Penelitian dengan Penelitian terdahulu di sini penulis mengambil judul penelitian Implementasi Program Bank Sampah Pada

Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sini penulis mengangkat tentang program bank sampah di mana program bank sampah adalah tabungan sampah dari masyarakat ataupun instansi yang mana dengan adanya program ini di harapkan dapat mengurangi volume sampah yang di angkut ke TPA. Namun dalam pelaksanaan nya memiliki kendala seperti masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam menumpulkan sampah seperti kertas, botol, dan lain-lain. Sedangkan dari penelitian terdahulu memiliki dua program yaitu tabungan samapah dan pembelajaran pengelolaan sampah yang mana tidak hanya menabung sampah saja tapi juga memberikan pembelajaran mengenai bagaimana mengelola samapah dengan 3R (*reduce, reuse, and recyele*).

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2022:1) “Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan terbaik.”

Kebijakan publik menurut Indra Kertati, dkk. (2023:1) secara umum dapat didefinisikan sebagai “Sebuah sistem berupa regulasi yang merupakan tindakan pengaturan, atau prioritas pendanaan mengenai topik tertentu yang diumumkan oleh entitas

pemerintah. Dalam arti luas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam mengatur masyarakat.”

Sementara itu, menurut Anderson dalam Marwiyah (2022:12) mendefinisikan ‘Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.’

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2021:2) ‘Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publipolicy is whatever governments choose to do or not to do*).’

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Marwiyah (2022:13) antara lain:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan

keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.

4. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
5. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan procedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

2. Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok

masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Marwiyah (2022: 14-16) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada di dalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat

dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut diatas maka hemat penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirumuskan secara sistematis melalui interaksi berbagai aktor, baik dalam bentuk tindakan maupun tidak bentuk tindakan, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan publik, mengatur kehidupan masyarakat, serta mencapai kesejahteraan umum melalui tahapan penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones dalam Syahrudin (2019:28), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting a job done*" dan "*doing a.*" Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut *resources*.

Sementara itu menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Marwiyah (2022:36) melihat 'Implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.'

Sedangkan menurut Wahab dalam Marwiyah (2022:36) 'Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.'

Menurut Riant dalam Joko Pramono (2022:2) 'Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang mungkin dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. baik secara langsung berupa program maupun merumuskan strategi turunan

atau turunan dari strategi tersebut. Kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kejelasan kebijakan publik dan sering disebut perintah eksekutif. Kebijakan publik yang bersifat operasional langsung meliputi perintah presiden, instruksi presiden, perintah menteri, perintah direktur daerah, dan perintah direktur.'

b. Model Implementasi

1. Model Warwick

Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Warwick mengemukakan bahwa model Implementasi Kebijakan di pengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan, pembagian potensi. (dalam Kadji Y, 2015)

a. Kemampuan Organisasi:

Dalam tahapan ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibedakan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (Standar

Oprasional Prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi

Kurangnya informasi dari para actor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

c. Dukungan

Kurang kesediaan objek-objek kebijakan “terkait” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

d. Pembagian Potensi

Pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

2. Model Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III disebut dengan *Direst and Inddirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikemukakan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, (dalam Agustion, 2020:154-158).

a. *Communication/Komunikasi*

Komunikasi ialah suatu yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. *Resource/Sumber daya*

Sumber daya merupakan hal yang penting, sumber daya utama adalah staf. serta informasi yang mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Adapun wewenang yang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan, dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya pada sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif.

c. *Disposition or attitudes* (Disposisi atau sikap)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out (melaksanakan) kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. *Bureaucratic structures*/Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi

yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation (perpecahan birokrasi) karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

3. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153) ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi

formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori tersebut diatas maka hemat penulis menyimpulkan bahwa Impelementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pihak terkait, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi tidak hanya sekedar menjalankan kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai unsur penting seperti sumber daya manusia, dana, serta kemampuan organisasi dalam melaksanakannya. Selain itu, implementasi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, melalui program atau strategi yang telah ditentukan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

3. Program Bank Sampah

a. Pengertian Program Bank Sampah

Program Bank Sampah merupakan salah satu inovasi dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Konsep bank sampah mengadopsi mekanisme perbankan, di mana masyarakat berperan sebagai “nasabah” yang menyetorkan sampah terpilah, kemudian sampah tersebut ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan sesuai dengan

nilai ekonominya. Hasil tabungan dapat diuangkan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan pengelola dan nasabah.

Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui sistem ini, masyarakat didorong untuk membiasakan diri memilah sampah dari rumah tangga, memahami nilai ekonomi sampah, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah adalah fasilitas untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.

Peraturan ini menegaskan bahwa bank sampah tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular (*circular economy*), yaitu sistem ekonomi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya. Dengan demikian, bank sampah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional pengurangan sampah dan pencapaian target pengelolaan sampah nasional.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bank sampah merupakan salah satu implementasi konkret dari amanat undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek pengurangan sampah di sumber.

Menurut Asteria dan Heruman (2016), bank sampah merupakan instrumen sosial yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah serta sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Keberhasilan bank sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.

Sementara itu, KLHK (2022) menyatakan bahwa bank sampah adalah model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mendukung transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih berkelanjutan melalui pengurangan timbulan sampah, peningkatan daur ulang, dan penguatan ekonomi masyarakat.

b. Fungsi Bank Sampah

Bank Sampah merupakan salah satu inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memiliki bagian fungsi penting dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Fungsi tersebut mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap kebijakan

pemerintah.

1. Fungsi Lingkungana

Fungsi utama bank sampah adalah mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Melalui sistem pemilahan sampah dari sumbernya, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan Kembali atau di daur ulang. Hal ini sejalan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah.

2. Fungsi Edukasi

Bank sampah berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan. Melalui kegiatan pemilahan, penimbangan, dan pencatatan sampah, masyarakat memperoleh pemahaman tentang jenis-jenis sampah dan pentingnya pengelolaan yang benar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 menegaskan bahwa bank sampah merupakan sarana edukasi dan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan budaya peduli lingkungan.

3. Fungsi Ekonomi

Bank sampah memiliki fungsi ekonomi karena sampah yang disetorkan masyarakat memiliki nilai jual. Sampah yang telah dipilah akan ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya, kemudian

dicatat sebagai tabungan. Sistem ini menjadikan sampah sebagai komoditas yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Sosial

Bank sampah juga berfungsi memperkuat partisipasi dan solidaritas sosial masyarakat. Kegiatan pengelolaan bank sampah biasanya melibatkan kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, atau komunitas lokal. Melalui partisipasi ini, tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan.

5. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Bank sampah berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan keterampilan pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna, seperti kerajinan tangan atau kompos. Hal ini mendorong tumbuhnya usaha kecil berbasis daur ulang dan mendukung konsep ekonomi sirkular.

6. Fungsi Pendukung Kebijakan Pemerintah

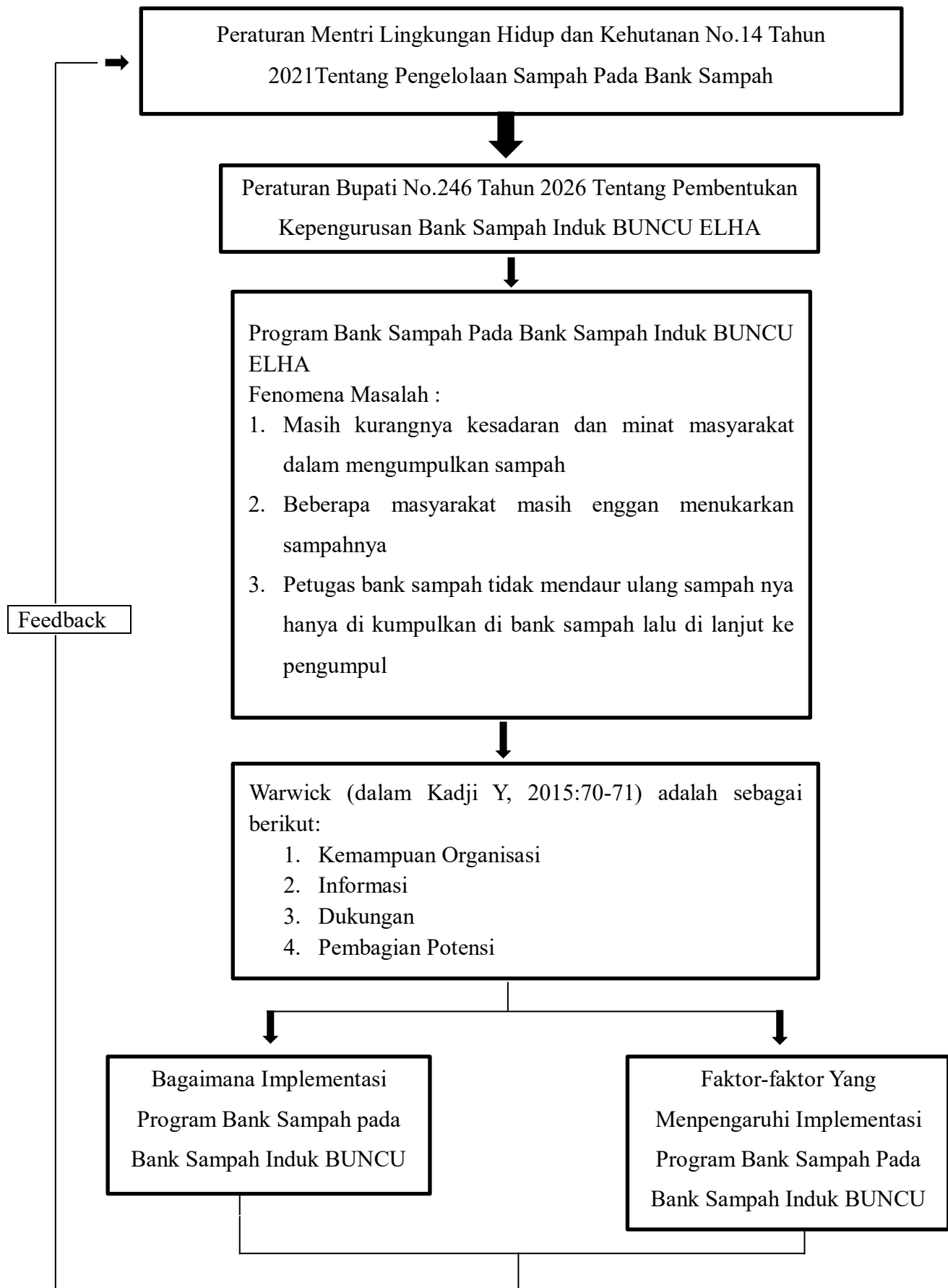
Bank sampah merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam pengurangan sampah. Dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 ditegaskan bahwa bank sampah mendukung pelaksanaan ekonomi sirkular dan pengurangan sampah nasional. Dengan adanya bank sampah, pemerintah daerah terbantu dalam mencapai target pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan pembahasan diatas maka hemat penulis menyimpulkan bahwa program bank sampah merupakan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan tujuan mengurangi timbulan sampah dari sumbernya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui mekanisme seperti perbankan. Program bank sampah ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi Program Bank Sampah pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA. Model Implementasi menurut warwick (dalam Kadji Y 2015:70-71) Implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, Pembagian Potensi.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini bertempat di Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Zuchri Abdussamad (2021:30) “Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.”

Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:53) ‘Pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta (pasti dan matematis).’

Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor dalam Zuchri Abdussamad (2021:30) menyebutkan bahwa ‘Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*.’

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono dalam I Made Sudarma Adiputra, dkk. (2021:45) 'Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif.'

Definisi Metode deskriptif kualitatif menurut Kim, Sefcik and Bradway dalam Ahmad Fauzi, dkk. (2022:24-25) adalah 'Metode penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual.'

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Nasution dalam Naamy Nazar (2019:115-116) 'Data adalah sebagai kebenaran sementara dalam kondisi tertentu yang merupakan bagian dari fakta yang menjadi sumber pengamatan dalam penelitian'.

Menurut Ibrahim (2018:68) “Data dalam penelitian sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder.”

a. Data Primer

Menurut Ibrahim (2018:68) “Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung”

Menurut Bungin dalam Ibrahim (2018:68) ‘Data primer adalah sebagai data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama di lapangan.’

Data Primer dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian tersebut. Data Primer adalah data pokok yang digali dari responden penelitian . Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin dalam Ibrahim (2018:69) ‘Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder ini menurutnya terbagi kedalam dua bentuk; pertama, internal data, yang tersedia tertulis pada sumber data sekunder; Kedua, eksternal data, yang diperoleh dari sumber luar seperti data sensus atau data statistik.’

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal dan lainnya. Serta

dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga didapat dari literatur di internet, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:67) ‘Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian.’

Sedangkan menurut Satori dalam Ibrahim (2018:67) ‘Sumber data berupa benda, orang maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui tentang sosial situation dalam objek material penelitian (sumber informasi).’

Sumber data yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Ibrahim (2018:72) “*Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu dalam benaknya. Dengan *purposive sampling*, peneliti tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili populasi.”

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1**Daftar Data Informan**

NO	Jabatan	Jumlah	Informan
1	Kepala Bidang Kebersihan Disperkim LH	1 Orang	Kunci
2	Direktur BUNCU ELHA	1 Oarang	Pendukung
3	Bendahara BUNCU ELHA	1 Orang	Pendukung
4	Staf BUNCU ELHA	2 Orang	Pendukung
5	Masyarakat / Nasabah	6 Orang	Utama
Total		11 Orang	

E. Desain Oprasional

Untuk memenuhi kualitas penelitian yang baik tentunya penulis diwajibkan membuat desain penelitian yang mengacu pada penelitian dan aspek yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk BUNCU ELHA Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka dari itu dirancang desain oprasional untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Berikut ini penulis sajikan desain oprasional yang bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Program menurut Warwick (Kadji Y, 2015: 70-71)	1. Kemampuan Organisasi	1. Kemampuan teknis 2. SOP 3. Koordinasi
	2. Informasi	1. Transmisi 2. Kejelasan
	3. Dukungan	1. Sikap menerima/ menolak masyarakat 2. Partisipasi masyarakat
	4. Pembagian Potensi	1. Keahlian 2. Pembagian wewenang

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023:296) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Riyanto dalam Hardani, dkk. (2020:125) ‘Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam

situasi sebelumnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.’

2. Wawancara

Menurut Nazir dalam Hardani, dkk. (2020:138) ‘Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau reponden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).’

3. Dokumentasi

Menurut Hardani, dkk. (2020:149-150) “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data- data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.”

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bongdan dalam Hardani, dkk. (2020: 161-162) *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes and other materials that you accumulateo*

increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh Berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani, dkk. (2020:163- 171) dibagi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2023:365-371) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun sumber baru. Dengan Perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data atau urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

5. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik Amuntai*: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Anonim. Peraturan Bupati No 246 Tahun 2026 Tentang *Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Induk "BUNCU ELHA"*. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Adiputra, I. M. dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, Ahmad. dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Pena Persada.
- Fitria Kurniawati. (2018) *Implementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Brawijaya.
- Hardani. dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hikmah, N. (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019).

Pedoman Pelaksanaan Bank Sampah. Jakarta: KLHK.

Kertati, Indra. dkk. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*.

Jambi: PT Sonpedia Publishing indonesia.

Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi,*

Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik. CV Mitra Ilmu.

Naamy, Nazar. dkk. 2019. *Medologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar &*

Aplikasinya. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. KLHK

RI.

Pramono, Joko. 2022. *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi*

dan Evaluasinya di Indonesia. Surakarta: UNISRI Press.

Subarsono. 2021. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan*

Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.